



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 08 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mark UP Anggaran di Benteng Menguat

BENGKULU - Tim Penyidik Pidana Khusus (Pid-sus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas perkara dugaan korupsi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Benteng. Dua sprindik tersebut ditujukan untuk Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Benteng.

Dalam waktu dekat dikabarkan sejumlah pejabat tinggi Benteng, satu persatu *diundang* oleh tim penyidik Kejati untuk dilakukan pemeriksaan terkait perkara ini. Sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol, SH,

MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Henri Nainggolan, SH, MH kepada awak media, kemarin.

Diakuinya bahwa perkara yang berawal temuan BPK senilai Rp 9 miliar tersebut sudah masuk dalam tahapan penyidikan sejak akhir pekan lalu. Beberapa bukti pendukung (dua alat bukti minimal) sudah didapati pihak kejaksaan sehingga tak ada alasan menunda-nunda kasus ini untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan. "Dipastikan berlanjut. Kita akan terus geber pengurusan. Kita targetkan sepekan ini sudah bisa menetapkan tersangkanya," tegas Henri.

Saat ini tim penyidik Kejati masih melakukan pendalaman atas perkara ini, khususnya oknum yang menggunakan uang negara dengan memalsukan beberapa kwitansi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. "Ada temuan terkait mark-up anggaran dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif, serta temuan lainnya. Saat ini kita masih melakukan pendalaman atas temuan-temuan tersebut," tegas Henri.

Terkait informasi uang

senilai Rp 9 miliar ini mengalir kepada seorang pejabat tinggi di Kabupaten Benteng, Henri tidak menampik hal tersebut. Hanya saja hingga saat ini ia masih belum mau membeberkan detail mengenai kemana aliran uang dan untuk kepentingan apa uang yang tidak sesuai dengan peruntukan tersebut.

Yang jelas perkara ini tentu tidak hanya melibatkan satu orang. Ada jaringan yang bermain dalam aliran dana temuan BPK sebesar Rp 9 miliar tersebut. Dan ini yang masih terus akan kita dalami. Yakinlah bahwa jaksa akan bekerja maksimal mengungkap perkara ini," ujar Henri.

Terkait adanya pengembalian kerugian negara atas temuan tersebut, Henri mengatakan silakan saja. Namun ia menegaskan perkara ini tidak akan berhenti sekalipun kerugian negara telah dikembalikan.

"Kejadiannya tahun 2016, dan temuan BPK muncul di tahun 2017. Kenapa baru tahun 2018 mau mengembalikan kerugian negaranya? Tak ada alasan apapun, kami akan tetap menuntaskan perkara ini," demikian Henri. (sly)